

KEHADIRAN JEPANG DI LAUT TIONGKOK SELATAN MELALUI KEBIJAKAN PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE

Iwan Ridwan Zaelani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Pasundan, Indonesia
iwanrz@unpas.ac.id

Clarinda Inda Rahayu*

Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Pasundan, Indonesia
clarindainda@gmail.com

*Corresponden Auhtor

INFO ARTIKEL *Abstract*

Article History

Received

9 July 2021

Revised

8 February 2022

Accepted

9 February 2022

Keywords:

*balance of power;
South China Sea;
Japan; proactive
contribution to
peace*

This study analyzes Japan's presence in the South China Sea in the interest of energy and sea lanes by implementing the Proactive Contribution to Peace policy. Descriptive methods and the concept of balance of power are used. The result showed that the Japanese government reformed the national security strategy, by implementing collective self-defense and expanding the role of JSDF in the effort of prevention and defending itself from various threats and actively participating in international peace as a reinterpretation of Article 9 of the Japanese Constitution. NSS emphasizes to strengthen cooperation with ASEAN countries that are in the SCS area. The conclusion of this study is that Japan applies diplomatic way in defense sector which include three aspects: (1) strengthening and expanding the role and capabilities of Japan, which include joint military training, cooperation in defense equipment and technology, and capability building assistance; (2) strengthening the Japan-US security alliance; and (3) strengthening strategic partnerships.

Kata Kunci:

*balance of power;
Laut Tiongkok
Selatan; Jepang;
proactive
contribution to
peace*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran Jepang di Laut Tiongkok Selatan dalam kepentingan energi dan jalur laut dengan menerapkan kebijakan *Proactive Contribution to Peace*. Metode deskriptif dan konsep *balance of power* digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Jepang mereformasi *national security strategy*, dengan menerapkan pertahanan diri kolektif dan memperluas peranan JSDF dalam upaya pencegahan dalam mempertahankan diri dari berbagai ancaman serta berupaya berpartisipasi aktif untuk perdamaian internasional sebagai reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang. NSS menekankan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang berada dalam wilayah LTS tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Jepang menerapkan cara-cara diplomatik di bidang pertahanan yang meliputi tiga aspek yaitu: (1) penguatan serta perluasan peran dan kemampuan Jepang, yang mencakup pelatihan bersama, kerjasama peralatan dan teknologi pertahanan, dan bantuan pengembangan kapasitas; (2) penguatan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat; dan (3) penguatan kemitraan strategis.

Pendahuluan

Lautan merupakan arena yang penting untuk aktivitas pengangkutan sebagian besar perdagangan global dan juga sebagai sistem utama komunikasi dan transportasi untuk negara-negara perdagangan maritim. Laut menawarkan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan dan mengatur berbagai hal seperti mengamankan perdagangan, kegiatan berlabuh, berpatroli dan operasi militer melalui jalur air sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas (UNCTAD, 2018). Konteks ini menjadi sorotan Jepang sebagai negara yang melakukan pemanfaatan atas laut, dengan fakta bahwa negaranya memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar kedelapan di dunia, yaitu sebesar 4.05 juta km² (Japan Coast Guard, n.d.). Jepang melakukan pemanfaatan sumber daya maritim, terutama minyak mentah, mineral dan perikanan untuk perekonomiannya. Jepang memiliki kebergantungan yang tinggi pada impor energi melalui jalur laut yang sebagian besar impor energinya diangkut melalui jalur di Laut Tiongkok Selatan. Jepang sangat bergantung pada jalur laut di LTS sebagai jalur paling strategis yang

menghubungkan Jepang, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Australia sebagai mitra impor sumberdaya dan juga mitra perdagangannya.

Laut Tiongkok Selatan, telah dikenal sebagai salah satu zona maritim vital di dunia yang memiliki nilai geopolitik dan geo-ekonomi yang tinggi. Laju perdagangan negara-negara khususnya di kawasan Asia Pasifik bergantung pada Selat Malaka yang terdapat di wilayah LTS, yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Di tahun 2016, perdagangan sebesar 3,37 triliun dollar AS melewati Laut Tiongkok Selatan (Tiongkok Power Team, 2017). Kekayaan energi yang terdapat di LTS diperkirakan menyimpan 190 triliun kaki kubik gas alam dan 11 miliar barrel minyak (Asia Maritime Transparency Initiative, n.d.). Karena kawasannya yang sangat strategis, banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan atas tumpang tindih klaim teritorial yang meningkatkan permasalahan ke level yang lebih tinggi, yang menjadikan kawasan ini mengalami instabilitas. Konflik berawal dari persaingan klaim atas kedaulatan teritorial yang meliputi pulau-pulau dan fitur yang terdapat di

wilayah Laut Tiongkok Selatan (Spratly dan Paracel). Konflik ini cenderung merujuk pada sikap agresif Cina yang melanggar kedaulatan negara-negara dengan mengklaim bahwa seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan milik Cina. Hal ini didasari dengan adanya “*historic right*” atas peta *nine dashed line* yang diterbitkan oleh Pemerintah Kuomintang di tahun 1947, bahwa semua pulau dan laut disekitar kawasan sembilan garis putus-putus merupakan milik Cina. Adanya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur tentang kerangka hukum dan penetapan zona atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara, serta upaya-upaya regional seperti *Declaration of Conduct (DOC)*, *Code of Conduct (COC)* oleh ASEAN nampaknya tak membuat Cina menghentikan ketegasannya di LTS.

Dengan melihat dan meninjau hal tersebut, situasi lingkungan strategis Jepang saat ini telah berubah secara signifikan, terutama karena adanya kekuatan baru yang muncul seperti Cina. Berkaitan dengan itu, prioritas kebijakan dalam keterlibatan Jepang di

Laut Tiongkok Selatan juga telah berubah. Sifat ekspansif Cina di Laut Tiongkok Selatan mulai mengganggu Jepang dengan asumsi akan menjadi suatu ancaman terhadap stabilitas dan keamanan jalur di Laut Tiongkok Selatan.

Oleh karena itu, Jepang dalam situasi ini merespon lebih kuat dan menjadi lebih terlibat sebagai salah satu negara yang mempunyai pengaruh kuat di kawasan dengan melakukan perubahan kebijakannya ke langkah yang lebih proaktif dalam menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Jepang yang sudah lama terkenal dengan negara pasifisme, saat ini mencoba mengedepankan “kontribusi proaktif” yang ditandai dengan adanya kebijakan global Jepang atas landasan *Proactive Contribution to Peace*, sehingga hal ini menjadi suatu reformasi kebijakan luar negeri Jepang, terutama dalam aspek keamanan dan pertahanan. Melalui kebijakan barunya ini, Jepang berupaya meningkatkan peran militer sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman serta berupaya berpartisipasi aktif untuk perdamaian internasional. *Proactive Contribution to Peace*

digunakan sebagai dasar atau landasan kebijakan Jepang dalam setiap perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang bertujuan mewujudkan upayanya untuk berkontribusi aktif dalam perdamaian internasional.

Kajian terdahulu mengenai topik seputar Jepang serta hubungannya dengan laut Tiongkok Selatan mencakup perspektif Jepang terhadap Laut Tiongkok Selatan dan dinamika keamanan jalur komunikasi laut. Kajian pertama berfokus pada perspektif dan analisis Jepang untuk LTS dengan keinginan untuk meningkatkan peran yang lebih aktif terhadap keamanan kawasan, dengan memerhatikan ketegasan Tiongkok di kawasan. Keinginan ini diwujudkan dengan memanfaatkan kerangka multilateral bersama ASEAN dalam meningkatkan *maritime domain awareness* (Shoji, 2014). Kemudian kajian kedua berfokus pada signifikansi kebebasan navigasi dari waktu ke waktu dengan merujuk situasi sengketa yang terjadi di LTS, yang dimana terdapat tantangan normatif dan tantangan fisik yang berpotensi membahayakan kebebasan navigasi (Harada & Eifuku, n.d.). Kelemahan

kajian terdahulu mengenai topik seputar Jepang dan Laut Tiongkok Selatan adalah kurangnya kajian yang membahas tentang kebijakan pasifisme proaktif sebagai latar belakang Jepang dalam memperluas peran di luar kawasan negaranya. Adapun tujuan dan signifikansi dari jurnal ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Jepang di Laut Tiongkok Selatan dengan meninjau kebijakan luar negerinya yaitu *Proactive Contribution to Peace*.

Pembahasan akan berfokus pada bagaimana langkah Jepang dalam menjaga keamanan laut di sekitar Laut Tiongkok Selatan dalam menjaga stabilitas jalur komunikasi laut. Khususnya pada konteks reformasi kebijakan keamanan Jepang yang menerbitkan kebijakan *Proactive Contribution to Peace* sebagai pendekatan strategis berdasarkan prinsip kerjasama internasional.

KERANGKA TEORITIS

Balance of Power

Sebelum membahas teori *Balance of Power*, perspektif neorealisme menjadi dasar pendekatan untuk melihat bagaimana Jepang mengaplikasikan kebijakan luar negerinya dalam sengketa Laut

Tiongkok Selatan. Berangkat dari pemikiran Kenneth Waltz, neorealisme hadir sebagai pandangan yang memandang adanya sistem dan struktur internasional yang anarki, yang memercayai adanya pengaruh yang ditimbulkan dari sistem internasional terhadap perilaku aktor. Konsep struktur dari sistem ini mengacu pada bagaimana struktur sistem dan apa saja yang ada didalamnya dapat memengaruhi suatu unit yang berinteraksi. Struktur internasional hadir ketika interaksi negara memengaruhi dan atau memunculkan batasan terhadap tindakan tertentu, sehingga terdapat perbedaan kapasitas *power* antar negara. Sistem internasional yang anarki memberikan suatu keadaan bahwa setiap negara bersaing dalam mempertahankan kekuatannya (Waltz, 1979). *Main goals* yang hendak dicapai oleh unit adalah *survival*, sehingga eksistensi negara dalam neorealisme merupakan hal yang utama. Negara harus mempertahankan keberadaannya dalam mencapai kepentingan sebagai aktor utama karena tidak ada kekuasaan lain di atas negara. Sistem internasional menuntut negara untuk memperjuangkan kepentingannya,

karena sistem internasional membentuk *self-help* yang berarti negara memiliki tanggungjawab penuh atas dirinya sendiri.

Dalam konteks ini, Kenneth Waltz menjelaskan bahwa sistem politik internasional yang anarki dan unit-unit dari sistem (negara) yang saling bertahan hidup (*survival*) membentuk *Balance of Power* (Waltz, 1979). *Balance of power* tercipta karena adanya kekuatan luar yang mengancam negara, sehingga sederhananya konsep ini memuat perihal tentang penyeimbangan kekuatan di dalam sistem internasional. Ketika suatu negara merasa terancam, mereka mencari keselamatan dengan berupaya *balancing* atau *bandwagoning*. Terdapat dua alasan mengapa suatu negara melakukan *balancing*. Pertama, ketika suatu negara merasa terancam oleh negara yang berpotensi mendominasi atau berpotensi melakukan hegemon. Kedua, ketika suatu negara mencoba merangkul negara-negara lain dengan kekuatan yang lebih kecil agar memiliki pengaruh lebih. Hal ini disebabkan karena negara yang kekuatannya kecil akan membutuhkan bantuan.

Dalam fenomena ini, penulis melihat bahwa Jepang memiliki kekuatan yang cukup mumpuni sehingga mampu untuk melakukan *balancing*. Pola *balancing* yang dilakukan adalah dengan menerapkan pola aliansi. Hal ini tergambar dengan adanya penguatan hubungan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat sebagai *great power* yang disinyalir mampu mengimbangi kekuatan Tiongkok sebagai *new rise power*. *Balance of power* adalah konsep yang tepat dalam menggambarkan fenomena antara Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan dalam mencapai keseimbangan kekuatan dan stabilitas regional.

Setiap negara akan menggunakan cara yang terbaik untuk kepentingannya, sehingga kepentingan nasional beroperasi sebagai sinyal otomatis terhadap pemerintah negara untuk bergerak. Kepentingan nasional dibentuk dari sistem internasional yang memengaruhi perilaku internasional negara, akan seperti apakah kebijakan yang ditarik untuk memenuhi kepentingan tersebut, yang memungkinkan adanya kesamaan negara sehingga menjadi tersosialisasi dalam sistem tersebut (Jackson &

Sorensen, 2013). Sederhananya, sistem memengaruhi dan menentukan kebijakan yang diambil. Hal ini tercermin dengan pola hubungan internasional Jepang yang didasari oleh pengaruh sistem internasional dan keterkaitannya dengan lingkungan keamanannya, yaitu melakukan normalisasi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang membatasi aktivitas militer sehingga menjadi negara pasifis yang menolak perang dan cinta damai. Dengan melihat dinamika lingkungan keamanan sekitar Jepang, Jepang mencoba menyesuaikan dengan situasi internasional dengan mencetus dan menetapkan kebijakan keamanan yang mengedepankan kontribusi aktif, yang diimplementasikan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara, tertuang dalam kebijakan luar negeri *Proactive Contribution to Peace*. Hal ini menggambarkan adanya penyesuaian kebijakan yang dipengaruhi oleh sistem internasional yang sedang berjalan. Sehingga, di masa pemerintahan keduanya ini, Shinzo Abe beserta kabinetnya melaksanakan reformasi yang besar bagi Jepang.

Atas konsepsi tersebut, penulis berpendapat bahwa kondisi lingkungan

keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang masih memanas akibat konflik teritorial dan sengketa, memunculkan kekhawatiran Jepang terhadap situasi ini atas kestabilan jalur bebas perdagangan di LTS. Kekhawatiran ini memunculkan upaya inisiatif dari Jepang untuk mengamankan kawasan tersebut dengan meningkatkan keterlibatan di Laut Tiongkok Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian membahas keputusan Jepang untuk terlibat dalam mengamankan jalur Laut Tiongkok Selatan. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa di masa kini (Nazir, 2017). Metode deskriptif diaplikasikan dengan mendeskripsikan variabel terkait dengan unit yang diteliti atas fenomena yang diteliti.

Penulis menggunakan teknik *library research* dengan mencari dan memperoleh informasi dari data sekunder, yaitu literatur-literatur yang

relevan dengan pembahasan seperti dokumen resmi pemerintah Jepang, buku, jurnal, artikel, dan berita yang didapatkan dari berbagai referensi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat bahwa kepentingan besar Jepang di Laut Tiongkok Selatan adalah kepentingan energi dan jalur laut. Hingga saat ini, sebagian besar impor energi Jepang dikirim melalui jalur perdagangan di LTS. Di tahun 2018, Jepang menduduki peringkat kelima sebagai konsumen minyak terbesar dan mendapati pula peringkat keempat sebagai importir minyak mentah terbesar. Jepang juga menempati peringkat sebagai importir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia dan importir batubara terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India. Jepang tidak memiliki minyak atau gas alam pipa internasional dan bergantung secara eksklusif pada pengiriman tanker LNG dan minyak mentah. Konsumsi minyak Jepang diperkirakan mencapai 3,7 juta barrel per hari, yang menjadikan Jepang sebagai konsumen minyak bumi terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia (U.S. Energy

Information Administration, 2020). Sumber daya energi domestiknya hanya dapat memenuhi kurang dari 15 persen dari total penggunaan energi primernya sendiri. (lihat tabel 1)

Tabel 1. Kebergantungan Jepang terhadap Energi

Batu Bara	99,7 %
Gas Alam Cair (LNG)	97,5 %
Minyak Mentah	99,3 %

Sumber: Agency for Natural Resources and Energy Japan (2018).

Fokus Jepang pada Laut Tiongkok Selatan diawali sekitar tahun 1960-an, yang utamanya adalah keamanan jalur laut. Laut Tiongkok Selatan memuat SLOC yang strategis untuk kegiatan perdagangan dan pasokan energi dalam menunjang perekonomian Jepang. Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk impor minyak mentahnya, karena di tahun 2012, sekitar 83 persen impor minyak mentah Jepang berasal dari Timur Tengah, yang merupakan kenaikan dari pertengahan 1980-an yang sebelumnya hanya sebesar 70 persen. Arab Saudi adalah pemasok minyak terbesar untuk Jepang, yang merupakan 33 persen dari portofolio impor atau lebih dari 1,2 juta barel

minyak mentah per harinya. Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait dan Iran merupakan sumber penting lainnya untuk kebutuhan minyak Jepang (U.S. Energy Information Administration, 2013). Selain itu, Jepang juga mengimpor gas alam cair dan batu bara dari Australia sebagai mitra utama, juga mengimpor gas alam cair dari Malaysia sebesar 13,6 persen dan mengimpor batu bara dari Indonesia sebesar 11.8 persen.

Dalam kegiatan ekonominya atas impor dan perdagangan, sebagian besar minyak dan energi lainnya diangkut melalui jalur laut menggunakan armada nasional Jepang. Barang diangkut melewati SLOC di LTS dengan menggunakan kapal-kapal komersial Jepang. (lihat tabel 2)

Tabel 2. Kapasitas Pengangkutan berdasarkan Jenis Kapal

<i>(Thousands DWT)</i>	2005	2010	2015	2019
Total fleet	16	17	31	39
Oil tankers	013.0	707.2	027.2	358.2
Bulk carriers	5	5	6	10
General cargo	504.0	028.5	697.1	717.9
Container ships	6	6	17	19
Other types of ships	757.0	607.9	609.9	712.8
	2	2	2	2
	133.0	491.2	789.3	800.0
	474	123.9	124.3	1
	1	3	3	4
	145.0	455.7	806.6	553.7

Sumber: (UNCTAD, 2019)

Pengangkutan barang dalam jumlah ribuan DWT (*deadweight tonnage*) menggunakan kapal pengangkut minyak, kargo, dan komoditas lainnya yang mencapai ribuan kapal. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2019, selalu mengalami peningkatan jumlah angkut. Atas kebergantungannya terhadap Jalur Komunikasi Laut diT, segala macam gangguan pada SLOC akan berdampak besar bagi kegiatan ekonomi Jepang. Sehingga hal ini menjadi perhatian keamanan nasional Jepang untuk melindungi dan menjamin keselamatan SLOC di Laut Tiongkok Selatan.

***Proactive Contribution to Peace* sebagai Reformasi Kebijakan Keamanan Jepang**

Dalam merespon lingkungan keamanan yang berubah drastis, Jepang dibawah pemerintahan PM Shinzo Abe membentuk Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy*) pada Desember 2013. Kata kunci dari strategi ini adalah *Proactive Contribution to Peace*, yang mendorong Jepang untuk memainkan

peran yang lebih proaktif yang sejalan dengan prinsip perdamaian internasional. Kebijakan ini berawal dari pandangan bahwa Jepang tidak dapat melindungi perdamaian dan dan keamanannya sendiri, sehingga Jepang perlu berkontribusi secara aktif terhadap stabilitas keamanan regional dan global. Jepang berupaya meningkatkan peran militer sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman serta berupaya berpartisipasi aktif untuk perdamaian internasional. Konsep ini juga mendorong partisipasi Jepang untuk berkontribusi aktif terhadap perdamaian atas prinsip kerjasama internasional (The Government of Japan, 2014).

Pada 20 Maret 2015, pemerintah Jepang mengadakan 25 pertemuan dengan pihak partai dalam mencapai kesepakatan atas arahan dasar pengembangan undang-undang keamanan. Dalam proses negosiasi ini, dihasilkan pembatasan untuk pelaksanaan pertahanan diri kolektif, yaitu:

1. Pertahanan diri kolektif dapat dilaksanakan apabila terdapat serangan bersenjata terhadap negara

- asing yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang dan sebagai akibatnya mengancam kelangsungan hidup Jepang;
2. Apabila tidak ada cara lain atau alternatif lain yang sesuai untuk menangkis serangan dan memastikan kelangsungan hidup Jepang dan rakyatnya;
 3. Penggunaan kekuatan digunakan seminimal mungkin (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2016a).

Pelaksanaan pertahanan bela diri kolektif ini berkaitan dengan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang yang berupaya memperluas peranan JSDF (GSDF, MSDF, ASDF) untuk terlibat dalam aktivitas keamanan internasional. Namun, hal ini menuai kontroversi dari berbagai pihak, terutama rakyat Jepang yang menolak adanya reinterpretasi karena bersinggungan dengan aturan dalam konstitusi yang dikhawatirkan pasifisme Jepang akan pudar. Namun dalam pandangan Shinzo Abe, perubahan kebijakan keamanan ini ditujukan untuk melangkah pada Jepang yang lebih aktif atau disebut dengan *proactive pasifism* atau pasifisme proaktif yang diterjemahkan pada frasa *Proactive Contribution to*

Peace dengan tujuan agar Jepang dapat memberikan kontribusi yang lebih lagi terhadap stabilitas internasional, dengan tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan konstitusi dan tetap berpegang kepada prinsip negara yang cinta damai dan tidak akan mendekati perang.

Pada tanggal 14 Mei 2015, pemerintah Jepang membuat keputusan kabinet atas dua RUU yaitu RUU Pengembangan Legislasi untuk Perdamaian dan Keamanan dan RUU Dukungan Perdamaian Internasional yang akan memungkinkan Jepang untuk berpartisipasi dalam jangkauan yang lebih luas dari operasi penjaga perdamaian PBB dan kegiatan kerjasama perdamaian internasional lainnya. Selain latihan pertahanan diri kolektif, undang-undang tersebut akan memungkinkan *Self Defense Forces* untuk memberikan dukungan pertahanan tidak hanya untuk pasukan AS tetapi juga pasukan asing lainnya dalam situasi yang akan berdampak signifikan pada perdamaian dan keamanan Jepang (Government of Japan, 2015). Selain itu, Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanan di tahun 2013 sebesar 49.023,9 juta US

Dollar (Stockholm International Peace Research Institute, 2019).

Kehadiran Jepang di Laut Tiongkok Selatan ditinjau dari kebijakan *Proactive Contribution to Peace*

Kehadiran Jepang di kawasan Laut Tiongkok Selatan bertujuan untuk memaksimalkan perdamaian regional dan stabilitas maritim, dengan menciptakan lingkungan internasional yang stabil di bawah kebijakan *Proactive Contribution to Peace*. Adanya peningkatan resiko atas terhambatnya pemanfaatan dan akses bebas laut, dalam dokumen *National Security Strategy* disebutkan:

“Di Laut Tiongkok Selatan khususnya, perselisihan yang muncul atas kedaulatan antara negara-negara pesisir dan Cina menimbulkan kekhawatiran atas pemeliharaan supremasi hukum di laut, kebebasan navigasi dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kerentanan juga meningkat pada jalur komunikasi laut, yang terbentang antara Jepang dan Timur Tengah, di mana Jepang sangat bergantung pada sumber daya alam dan energinya karena berbagai masalah termasuk konflik regional dan terorisme internasional di dalam dan sekitar negara-negara pesisir serta pembajakan. Oleh karena itu,

meningkatkan upaya untuk masalah ini juga penting untuk mengamankan jalur laut” (The Government of Japan, 2013).

NSS menekankan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang berada dalam wilayah kritis tersebut. Selain itu, Jepang juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara lain dengan memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk pula keamanan laut.

Dalam konteks ini, Perdana Menteri Shinzo Abe mendeklarasikan *Free and Open Indo-Pasific* (Strategi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka) dalam pidatonya di *Tokyo International Conference on African Development* (TICAD) VI yang diselenggarakan di Kenya, Agustus 2016. Gagasan ini didasari oleh perspektif Jepang bahwa diplomasi memerlukan perspektif panorama peta dunia dan berkesinambungan dengan *Proactive Contribution to Peace* berdasarkan prinsip kerjasama internasional, sehingga hal ini dimaksudkan untuk memperluas konsep diplomatik tersebut. Visi ini bertujuan untuk menjamin kegiatan

ekonomi yang bebas dan kuat di seluruh Indo-Pasifik. PM Abe menyampaikan bahwa kunci stabilitas dan kemakmuran komunitas internasional adalah dinamisme yang tercipta atas penggabungan dua benua (Asia dan Afrika) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), dengan visi meningkatkan konektivitas antara Asia dan Afrika melalui Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan mendorong stabilitas dan kemakmuran di seluruh kawasan. Dari gagasan FOIP ini, konektivitas antar benua sangat penting bagi Jepang karena menyangkut tentang pasokan energi Jepang yang dimana keamanan interkoneksi maritim perlu dijaga untuk keberlangsungan hidup Jepang (The Government of Japan, 2017).

Selain itu, Jepang juga menekankan “Tiga Prinsip Aturan Hukum di Laut” untuk Laut Tiongkok Selatan, yaitu (1) membuat dan mengklarifikasi klaim berdasarkan hukum internasional; (2) tidak menggunakan kekerasan atau tindakan koersif dalam mempertahankan klaim; dan (3) berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Jepang juga mendukung arbitrase Filipina atas klaim Tiongkok di pengadilan

internasional dengan pernyataan: “Karena putusan Pengadilan bersifat final dan mengikat secara hukum para pihak yang bersengketa berdasarkan ketentuan UNCLOS, para pihak dalam kasus ini diwajibkan untuk mematuhi dengan penghargaan tersebut. Jepang sangat mengharapkan kepatuhan para pihak terhadap penghargaan ini pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian sengketa secara damai di Laut Tiongkok Selatan (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019). Untuk memperkuat kehadiran di LTS, Jepang menerapkan cara-cara diplomatik di bidang pertahanan yang meliputi tiga point yaitu: (1) Penguatan serta perluasan peran dan kemampuan Jepang; (2) Penguatan aliansi keamanan Jepang – Amerika Serikat; dan (3) Penguatan kemitraan strategis.

Penguatan serta Perluasan Peran dan Kemampuan Jepang

Jepang membentuk Pasukan Pertahanan Gabungan Dinamis (*Dynamic Joint Defense Force*) sebagai komitmen SDF dalam merespon berbagai situasi, dengan meningkatkan kemampuan pencegahan dan tanggapan dengan meningkatkan tingkat peralatan dan

penggunaannya untuk terlibat dan melaksanakan operasi gabungan secara cepat dan berkelanjutan, serta mengembangkan kemampuan pertahanan yang efektif untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang lebih kuat (Government of Japan, 2013). Jepang mencoba memaksimalkan kemampuan pertahanannya secara aktif untuk bekerja sama mempromosikan pelatihan dan latihan bersama dan juga kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan, kemudian memajukan kegiatan kerja sama seperti bantuan pengembangan kapasitas yang sejalan secara bilateral (Government of Japan, 2013).

Pelatihan dan Latihan Bersama

Untuk operasi pelatihan dan latihan bersama, Jepang melaksanakan latihan angkatan laut gabungan dengan Filipina pada Mei 2015 di dekat Scarborough Shoal dengan mempraktikkan *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) sebagai perjanjian yang ditandatangani Jepang-Filipina dalam memperkuat kerjasama keamanan (Kelly & Mogato, 2015). Jepang juga mengadakan latihan

bilateral dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada Oktober 2015, yang dimana latihan ini terjadi beberapa hari setelah operasi pertama FONOP AS dilakukan dalam jarak 12 mil laut dari Subi Reef dan fitur sengketa lainnya di Kepulauan Spratly (Panda, 2016). Kemudian Kapal Ise MSDF Jepang, kapal perusak helikopter kelas Hyuga, yang membawa 4 helikopter dan 360 awak, berlabuh di Dermaga Alava di Subic Bay Freeport Zone untuk kunjungan militer ke bekas pangkalan laut AS di Filipina. Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam hubungan dengan Filipina, dengan melakukan interaksi pertahanan atas kunjungan Personel angkatan laut Jepang kepada Komando Pendidikan dan Pelatihan Angkatan Laut di San Antonio, Zambales, sementara personel Angkatan Laut Filipina akan melakukan tur kapal di dalam kapal Jepang (Parameswaran, 2016). MSDF juga terlibat dalam latihan militer AS-Filipina “Kamandag” pada Oktober 2018 dengan melibatkan 100 personel MSDF, mengirimkan kapal bantuan kemanusiaan dan melakukan simulasi operasi penyelamatan, yang mana latihan tersebut dilakukan di sepanjang

pantai Luzon Barat dalam jarak 250 km dari Scarborough Shoal (DeAeth, 2018). Latihan kapal selam juga digelar oleh Jepang untuk pertama kalinya pada 13 September 2018 yang melibatkan kapal Kuroshio dan tiga kapal Jepang lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan *port call* atau kunjungan singkat ke Cam Ranh, Vietnam pada 17 September. Latihan ini ditegaskan oleh sumber-sumber pemerintahan sebagai tindak sah yang digelar di perairan netral yang dilindungi hukum internasional (Christiastuti, 2018).

Selain melaksanakan latihan dengan negara-negara ASEAN, Jepang juga terlibat dalam latihan militer Malabar dengan India dan AS pada tahun 2015, yang secara resmi diundang oleh India dan menjadi mitra tetap dalam latihan kerjasama ini. Latihan gabungan ini disinyalir merupakan bentuk peningkatan hubungan strategis dengan India dan AS dan meliputi beberapa manuver seperti operasi bajak laut, pencarian dan penyelamatan, serta bantuan kemanusiaan dan bencana. Jepang telah berpartisipasi dalam *Malabar Naval Exercise* sebanyak empat kali di tahun 2015 hingga 2018.

Kerjasama Peralatan dan Teknologi Pertahanan

Berdasarkan Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan, Jepang mempromosikan kerja sama di bidang alutsista dan teknologi dengan negara-negara lain, dengan bertujuan merealisasikan kerjasama alutsista dan teknologi secara efektif melalui penguatan pengumpulan informasi mitra kerja, bantuan pemeliharaan dan perbaikan alutsista, serta penguatan postur kerjasama antara sektor publik dan swasta. Penulis mengutamakan membahas kerjasama dengan negara-negara di kawasan LTS untuk berkontribusi dalam mempromosikan pemeliharaan dan peningkatan produksi pertahanan dan basis teknologi. Pertukaran pandangan mengenai kerja sama alutsista dan teknologi terjalin dalam sektor keamanan non-tradisional, seperti bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, dan keamanan maritim, yang disampaikan melalui *ASEAN-Japan Defense Ministers' Informal Meeting* dalam Visi Viantine (*Viantine Vision*) pada November 2016 bahwa kerjasama Jepang-ASEAN untuk alutsista dan

teknologi difokuskan pada alih peralatan dan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan penyelenggaraan seminar industri pertahanan (Ministry of Defense Japan, n.d.). Jepang menyumbangkan pesawat dan kapal sebagai peralatan pertahanan maritim, dengan mendonasikan enam kapal patroli ke Vietnam, melakukan pengalihan lima Pesawat Pelatihan TC-90 MSDF (pesawat patroli) ke Filipina dan menyewakan unit kapal lain ke Indonesia. Selain menyediakan persenjataan dan latihan penahanan, Jepang telah membangun infrastruktur maritim untuk menjaga keamanan, yaitu dengan mendirikan stasiun radar di Kepulauan Sulu Celebes untuk mencegah pembajakan (Irsadanar, 2020).

Bantuan Pengembangan Kapasitas

Untuk bantuan pengembangan kapasitas, Jepang akan mempromosikan dan melaksanakannya dalam koordinasi penuh dengan inisiatif kebijakan diplomatik, termasuk bantuan resminya yaitu *Official Development Assistance* (ODA), dan akan memperluas jangkauan negara yang

menerima dukungan serta cakupannya. Di bidang keamanan dan pertahanan, Kementerian Pertahanan Jepang bersama dengan SDF menggunakan kemampuan dan sumberdayanya untuk memberikan bantuan militer negara lain maupun organisasi terkait militer. ODA Jepang untuk Asia Tenggara berjumlah USD 86 miliar dari tahun 1960 hingga 2017 (28 persen dari ODA Jepang). Pada Januari 2017, Jepang dan Filipina menandatangani Nota Kerja Sama antara Penjaga Pantai Filipina dan Penjaga Pantai Jepang, dengan menghibahkan dana sebesar 600 juta yen (sekitar \$ 259,8 juta) untuk kapal berkecepatan tinggi dan peralatan kontra-terorisme lainnya untuk Penjaga Pantai Filipina (CNN Philippine Staff, 2017). Jepang juga telah meningkatkan hubungan keamanan dengan Vietnam dengan melakukan pertemuan Perdana Menteri kedua negara di Tokyo, dengan bertukar pemikiran terkait keprihatinan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, yang kemudian melaksanakan penandatanganan perjanjian bantuan Jepang sebesar 38 miliar yen untuk meningkatkan kapal Penjaga Pantai Vietnam dan meningkatkan kemampuan patroli (Hart, 2017).

Penguatan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat

Jepang memberikan prioritas tertinggi untuk penguatan aliansi Jepang-AS, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Perjanjian keamanan yang telah terjalin dari tahun 1951, aliansi kedua negara hingga saat ini terjalin dengan kuat. Jepang dan AS merevisi Pedoman Kerjasama Pertahanannya, yang kemudian Komite Konsultasi Keamanan (SCC) merilis Pedoman Pertahanan 2015 dengan menggarisbawahi bahwa aliansi menghadapi lingkungan keamanan yang semakin kompleks, dengan tetap mematuhi batasan kebijakan pertahanan Jepang (Sakoda, 2015). Dalam pedoman yang baru ini, kerja sama pertahanan dan keamanan bilateral menekankan kerjasama yang mulus, kuat, fleksibel dan efektif (Japan & US, 2015).

Pada 30 Mei 2015, dilaksanakan Pertemuan Menteri Pertahanan Jepang-AS yang menyepakati untuk menentang perubahan status quo secara sepihak di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Baik selama

pemerintahan Obama dan pemerintahan Trump, AS telah melakukan beberapa operasi kebebasan navigasi di perairan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan, seperti yang dilaksanakan di dekat Subi Reef di bulan Oktober 2015 dengan mendapat dukungan dari Jepang terhadap operasi kebebasan operasi navigasi AS dan setuju untuk meningkatkan inisiatif peningkatan kapasitas di Laut Tiongkok Selatan (Borah, 2020). Namun Jepang menegaskan bahwa dukungan terhadap operasi AS tersebut tidak melibatkan MSDF. Hal ini ditekankan oleh Menteri Pertahanan Jepang Tomomi Inada bahwa Jepang akan meningkatkan keterlibatan di LCS dengan memainkan perannya melalui kerjasama dan pelatihan pertahanan (RT Question More, 2017). Tidak dilibatkannya pasukan maritim Jepang dalam operasi AS ini disebabkan oleh terikatnya Jepang dengan Konstitusi Pasal 9 atas pembatasan aktivitas militer Jepang, meskipun telah ada reinterpretasi terhadap pasal. Hal ini memperlihatkan bahwa reinterpretasi tidak berupaya mengubah ketentuan, namun lebih kepada memberikan tafsir baru, yang menghantarkan adanya

pertahanan diri kolektif. Menteri Inada menegaskan bahwa tekad pemerintah Jepang adalah melindungi integritas dan kedaulatan wilayah Jepang, melanjutkan upaya pertahanan nasionalnya serta mempertahankan dan meningkatkan aliansi Jepang-AS (Panda, 2017). Keterlibatan ini dilaksanakan Jepang dengan berpartisipasi dalam latihan militer, yang dimana Kuroshio bergabung dengan kapal perusak pembawa helikopter yaitu Kaga dalam operasi anti-kapal selam gabungan dengan Angkatan Laut AS (Sato, 2018).

Kemitraan Strategis Jepang

Stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara sangat penting untuk laju perdangangan global. Dalam jurnal ini, penulis memfokuskan pembahasan poin ini terhadap penguatan hubungan Jepang dengan memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara di wilayah yang disengketakan di LCS, yaitu: Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Filipina

Jepang dan Filipina telah memperkuat hubungan bilateral mereka menjadi Kemitraan Strategis semenjak September 2011, dan ditingkatkan menjadi *Strengthened Strategic Partnership* dengan melaksanakan Deklarasi Bersama pada Juni 2015. Rencana Aksi untuk mengimplementasikan hubungan baru ini merupakan kesepakatan tentang transfer alutsista dan teknologi, perluasan pelatihan dan latihan bilateral dan multilateral untuk peningkatan kapasitas angkatan bersenjata Filipina, dan akuisisi kapal patroli untuk Penjaga Pantai (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2015a). Pada April 2016, kapal selam JMSDF Oyashio, bersama dengan kapal perusak JMSDF Ariake dan Setogiri, membuat pelabuhan di Subic Bay di Filipina dan menyumbangkan sepuluh kapal serbaguna ke Filipina menggunakan ODA yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan (selengkapnya tertera di lampiran 3) yang ditandatangani pada Februari 2016 - bahwa Jepang akan menyewakan pesawat lapis JMSDF TC90 ke Angkatan Laut Filipina (Satake, 2016b). Kemudian, Asahi

Shimbun (media Jepang) melaporkan bahwa Jepang menawarkan pesawat turboprop bermesin kembar TC-90 bekas, yang digunakan untuk pelatihan *Maritime Self-Defense Force* (MSDF) Jepang ke Filipina, yang kemungkinan pesawat-pesawat ini akan digunakan untuk misi patroli di atas Laut Tiongkok Selatan (Pollmann, 2015). Pada Agustus 2017, Menhan Jepang menawarkan pesawat patroli PC-3 dan suku cadang untuk helikopter UH-1 ke Filipina (Perwita & Ersandi, 2018).

Selain sebagai mitra strategis, Jepang merupakan mitra perdagangan terbesar Filipina di tahun 2018 dengan menyumbang total perdagangan sebesar USD 20,02 miliar, yang menjadikan Jepang sebagai investor terbesar ketiga dengan total investasi pada 19,73 miliar peso Filipina. Jepang juga merupakan sumber Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) terbesar yang menyumbang \$ 6,27 miliar (Synergy Media Specialists, 2019).

Vietnam

Kedua negara telah menjadi mitra strategis sejak tahun 2006, yang kemudian meningkatkan hubungan mereka dengan melaksanakan deklarasi bersama "Kemitraan

Strategis Ekstensif" tahun 2014. Jepang membantu Vietnam dalam peningkatan kapasitas militer, termasuk penyerahan kapal patroli bekas, diskusi antara angkatan bersenjata kedua negara bersama dan melaksanakan latihan angkatan laut bersama (Tuoitrenews, 2014). Pada November 2015, dilaksanakan konsultasi pertahanan yang menyepakati terkait perizinan Kapal MSDF untuk melakukan *port calls* di Cam Ranh Bay, pelabuhan Vietnam yang dekat dengan LCS (Pollmann, 2015). Kapal perusak MSDF, Ariake dan Setogiri juga terlibat dalam pembangunan pelabuhan di Cam Ranh Bay di Vietnam Selatan untuk pertama kalinya dan pada saat yang bersamaan, kapal perusak besar MSDF Ise melintasi Laut Tiongkok Selatan untuk berpartisipasi dalam peninjauan armada internasional dan latihan multilateral (Satake, 2016a).

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc melakukan kunjungan terakhir ke Tokyo pada bulan Juni 2017 ketika ia memulai pembicaraan dengan PM Shinzo Abe mengenai sikap agresif Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan pembahasan bahwa perkembangan

kompleks yang terjadi menarik fokus diskusi keduanya. Dari diskusi inilah, menghantarkan pelaksanaan bantuan pembangunan Jepang senilai 38 miliar yen (USD 350 juta) untuk meningkatkan kapal penjaga pantai Vietnam dan kemampuan patroli mereka. Jepang juga menyumbangkan enam kapal patroli bekas untuk Angkatan Laut Vietnam (Borah, 2020).

Indonesia

Meskipun Indonesia dan Tiongkok tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, namun aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Natuna membuat Indonesia menjadi lebih sigap terhadap hal tersebut. Dengan begitu, Jepang telah memberikan dukungan konkrit untuk Indonesia dengan mengirimkan personel SDF dan *Japan Coast Guard* ke Indonesia untuk membantu meningkatkan kemampuan angkatan laut negara (Drifte, 2016). Pada kesempatan Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri Kishida mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang membahas mengenai penguatan

kemitraan strategis kedua negara dan untuk bekerja sama satu sama lain dalam hubungan bilateral di samping masalah regional seperti Laut Tiongkok Selatan, Korea Utara dan lain-lain. Jepang dan Indonesia melaksanakan penandatanganan memorandum Kementerian Pertahanan kedua negara tentang Kerjasama dan Pertukaran di Bidang Pertahanan yang memuat tentang keinginan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan pertukaran berdasarkan prinsip kesetaraan, manfaat bersama dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pada bulan Desember 2015, Jepang mengadakan pembicaraan keamanan “2+2” dengan Indonesia, forum pertama dengan anggota ASEAN, dan kedua belah pihak sepakat pada pertemuan pertamanya untuk memulai negosiasi kesepakatan transfer alutsista dan teknologi.

Pada Desember 2016, Menko Maritim Luhut Panjaitan berkunjung ke Jepang dan menandatangani Nota Kerja Sama dengan Menlu Kishida untuk membentuk *Japan-Indonesia Maritime Forum* guna mendorong kerjasama di bidang maritim antara

Jepang dan Indonesia ke depan baik sebagai negara maritim (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2017). Disusul pada Januari 2017, dilaksanakan Pernyataan Bersama Jepang-Indonesia tentang Penguatan Kemitraan Strategis di Istana Bogor ketika PM Abe melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, yang kemudian pemimpin kedua negara mengadakan diskusi tentang isu-isu regional dan global yang dianggap penting yang ditekankan pada penguatan kemitraan pertahanan lebih lanjut (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2018). Jepang juga berencana memberikan bantuan sebesar 2,5 miliar yen (atau USD 23 juta) kepada Indonesia untuk membangun fasilitas perikanan di pulau-pulau terpencil di saat pengaruh Tiongkok meningkat di wilayah Natuna. Bantuan akan digunakan untuk membangun pelabuhan dan fasilitas perikanan untuk meningkatkan infrastruktur dan kegiatan ekonomi Indonesia (Kyodo, 2018).

Malaysia

Penguatan kerjasama dilaksanakan pada bulan Mei 2015, yang dimana Perdana Menteri Najib mengunjungi Jepang untuk kunjungan

kerja resmi, dan kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi "kemitraan strategis", yang terus memperkuat kerja sama dalam berbagai masalah di komunitas regional dan internasional (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2016b). Pada pertemuan tersebut, PM Abe menyampaikan bahwa sebagai upaya konkrit, Jepang dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama di bidang peralatan pertahanan dan Jepang akan memberikan kerjasama dalam keselamatan maritim dengan menawarkan bantuan yang diperkuat kepada Badan Penjaga Pantai Malaysia. Kedua pemimpin negara bernegosiasi tentang kerangka kerjasama transfer peralatan pertahanan dan teknologi (Kameda, 2015). Kemudian mereka menyelenggarakan "Pernyataan Bersama Jepang-Malaysia tentang Kemitraan Strategis", yang menyinggung pada keamanan SLOC terutama di Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan, yang penting untuk perdagangan dan kemakmuran ekonomi serta menekankan pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di wilayah maritim sesuai dengan hukum internasional, termasuk

UNCLOS sebagai hukum laut internasional (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2015b). Kedua pemimpin negara juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan kebebasan navigasi yang menegaskan komitmennya sebagai mitra, tidak hanya dalam konteks ikatan bilateral namun juga memastikan ASEAN sebagai kawasan perdamaian dan kemakmuran. Kemudian pada tanggal 18 April 2018, dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara pemerintah Jepang dan Malaysia tentang Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan di Kuala Lumpur dalam rangka memperkuat hubungan pertahanan.

Brunei

Hubungan Jepang dan Brunei tidak terlalu menonjol di bidang militer, namun hubungan ekonominya kuat karena Brunei merupakan mitra dagang utama untuk memasok gas alam, dengan presentase sekitar 60 persen ekspor gas alam cair (LNG) Brunei ditujukan ke Jepang, dan LNG dari Brunei yang terhitung sebesar 5 persen impor LNG dari total impor

LNG Jepang. Kedua negara memperkuat hubungan bilateralnya seraya merayakan 30 tahun hubungan diplomatik di tahun 2014.

Meskipun tidak dipublikasikan secara luas, Jepang dan Brunei berbagi kemitraan pertahanan dalam rangka hubungan kemitraan yang diperluas, keduanya memiliki hubungan pertahanan yang meliputi pertukaran personel dan latihan, MSDF Jepang juga melakukan kunjungan dengan membawa pesawat dan kapal. Pesawat Angkatan Udara Jepang (JASDF) KC-767 mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Rimba, yang dilaporkan melakukan kunjungan perjalanan ke Pangkalan Udara Komaki. Dan setibanya disana, crew KC-767 disambut baik oleh delegasi *Royal Brunei Air Force* (Parameswaran, 2017). Di bulan Februari 2018, tiga kapal pesiar pelatihan luar negeri MSDF Jepang yaitu JS Sawagiri (DD-157), JS Yamagiri (DD-152) dan JS Yamayuki (TV-3519) berlabuh di Pelabuhan Komersial Muara Brunei dalam kunjungan niat baik selama empat hari. Upaya memperkuat hubungan pertahanan bilateral terus dilanjut dengan melakukan kunjungan

yang membahas cara untuk meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara, dan termasuk kegiatan MSDF dalam bidang kemanusiaan dan bantuan bencana serta pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) dan aktif dalam kegiatan seminar (Parameswaran, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik simpulan bahwa perubahan dalam lingkungan internasional membawa arti penting dalam budaya strategis Jepang yang berubah. Perubahan struktural ini cukup berdampak besar pada kebijakan keamanan Jepang. Dengan demikian, perubahan kebijakan keamanan Jepang mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi global dan juga sistem internasional. Dinamika lingkungan keamanan global telah memberikan dorongan dan dobrakan baru secara struktural terhadap kebijakan keamanan Jepang. *Proactive Contribution to Peace* diciptakan untuk memperkuat konektivitas dengan lingkungan internasional dengan berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian atas

prinsip kerjasama internasional, mengingat bahwa Jepang memiliki ketergantungan yang tinggi dengan mitra asing secara global. Kemunculan kekuatan-kekuatan adidaya baru seperti Tiongkok memberikan *refreshment* terhadap kebijakan Jepang dalam merespon dan juga menjaga ketahanan negaranya. Peningkatan kehadiran Jepang di Laut Tiongkok Selatan menandakan bahwa prioritas kepentingan Jepang di kawasan tersebut telah meningkat. Sehingga dalam mencapai stabilitas dan keamanan jalur di Laut Tiongkok Selatan untuk kelancaran akses impor dan perdagangannya, merupakan suatu hal yang dapat Jepang tempuh. Jepang mampu menangkal ketegasan Tiongkok dengan memperkuat upaya diplomatik di bidang pertahanan dan juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara di kawasan tersebut, khususnya negara-negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan. Penguatan hubungan kerjasama ini membantu Jepang mengamankan dan menyeimbangkan Tiongkok di kawasan, terlebih lagi Jepang mempererat aliansinya dengan Amerika Serikat.

Sebagai pengguna utama akses jalur laut di Laut Tiongkok Selatan, hendaknya Jepang perlu mengevaluasi dampak-dampak dan potensi ancaman di kawasan tersebut seraya mendorong dan memperkuat kerjasama negara-negara di kawasan dalam upaya menjamin dan memelihara keselamatan, keamanan dan kesejahteraan kawasan serta memastikan prinsip-prinsip hukum internasional ditegakkan dalam *domain* maritim.

REFERENSI

- Agency for Natural Resources and Energy Japan. (2018). *Japan's Energy 2018*.
- Asia Maritime Transparency Initiative. (n.d.). *South China Sea Energy Exploration and Development*. CSIS.
- Borah, U. (2020). The South China Sea dispute: Will it impact Japan's security policy? *Maritime Affairs*, 0(1), 1–24.
<https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1785033>
- China Power Team. (2017). *How Much Trade Transits the South China Sea?* CSIS.
- Christiastuti, N. (2018, September). Jepang Gelar Latihan Kapal Selam Pertama di Laut China Selatan. *DetikNews*.
- CNN Philippine Staff. (2017). *PH, Japan boost maritime security ties*. CNN Philippines.
- DeAeth, D. (2018, September). US, Philippines, Japan hold joint military exercises in South China Sea. *Taiwan News*.
- Drifte, R. (2016). Japan's Policy towards the South China Sea – Applying “Proactive Peace Diplomacy”? In *Peace Research Institute (PFI) Report* (Vol. 140, Issue 140).
- Government of Japan. (2013). *NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES for FY 2014 and beyond*.
- Government of Japan. (2015). *Japan's Legislation for Peace and Security*.
- Harada, Y., & Eifuku, S. (n.d.). *Chapter 1 The Security of the Sea Significance of the Freedom of Navigation and Related Challenges*.
- Hart, M. (2017). Japan's Maritime Diplomacy Mission in Southeast Asia. *The Diplomat*.
- Irsadanar, R. J. P. (2020). Japan's South China Sea Policy and Regional Subcomplex Expansion: Toward Free and Open Indo-Pacific. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9.

- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations - Theories and Approaches* (fifth). Oxford University Press.
- Japan & US. (2015). *The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation*.
- Japan Coast Guard. (n.d.). *Diagram Konseptual Perairan Teritorial Jepang*. Departemen Informasi Kelautan Jepang.
- Kameda, M. (2015). *Japan, Malaysia agree to beef up defense cooperation*. Japan Times.
- Kelly, T., & Mogato, M. (2015). Japan, Philippines to hold first naval drill in South China Sea: sources. *Reuters*.
- Kyodo. (2018). *Japan to help develop Indonesian islands in South China Sea*. South China Morning Post.
- Ministry of Defense Japan. (n.d.). *Defense Equipment and Technology Cooperation with Other Countries*. Ministry of Defense Japan.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2015a). "Japan-Philippines Joint Declaration: A Strengthened Strategic Partnership for Advancing the Shared Principles and Goals of Peace, Security and Growth in the Region and Beyond.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2015b). *Japan-Malaysia Joint Statement on Strategic Partnership*. Ministry of Foreign Affairs Japan.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2016a). *Development of Security Legislation*. Ministry of Foreign Affairs Japan.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2016b). *Japan Diplomatic Bluebook 2016*.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2017). *Japan Diplomatic Bluebook 2017*.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2018). *Diplomatic Bluebook Japan 2018*.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2019). *Japan Diplomatic Bluebook 2019*.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian* (11th ed.). Ghalia Indonesia.
- Panda, A. (2017). Japanese Defense Minister: Military 'Will Not Be Sent' to the South China Sea Alongside US. *The Diplomat*.
- Parameswaran, P. (2016, April). Japan Destroyer Visits Former US Naval Base in the Philippines. *The Diplomat*.
- Parameswaran, P. (2017). Japan Military Aircraft in Brunei Spotlights Defense Ties. *The Diplomat*.
- Parameswaran, P. (2018). Naval Visit Puts Japan-Brunei Defense Ties in the Headlines. *The Diplomat*.

- Perwita, A. A. B., & Ersandi, I. (2018). The Implementation of Japan-Philippines Maritime Diplomacy as Proactive Approach to Respond the Assertive China in South China Sea. *Jurnal Hubungan Internasional Mandala*, 1.
- Pollmann, M. (2015). *Amid South China Sea Tensions, Japan Strengthens Ties With Philippines, Vietnam*. The Diplomat.
- RT Question More. (2017). *Japan supports but won't join US 'freedom of navigation' patrols in South China Sea*. RT Question More.
- Sakoda, R. "Sak." (2015). *THE 2015 U.S.-JAPAN DEFENSE GUIDELINES: END OF A NEW BEGINNING*. Asia Maritime Transparency Initiative.
- Satake, T. (2016a). *Japan's defense diplomacy with ASEAN member-states*. Japan Times.
- Satake, T. (2016b). *Japanese Defense Diplomacy and ASEAN*. The Diplomat.
- Sato, Y. (2018). *Japan versus China in the South China Sea*. Nikkei Asia.
- Shoji, T. (2014). The South China Sea: A View from Japan. *NIDS Journal of Defense Studies and Security*, 15, 127–141.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2019). *SIPRI Military Expenditure Database*.
- Synergy Media Specialists. (2019). *Philippines on the Rise*. Japan Times.
- The Government of Japan. (2013). *National Security Strategy*.
- The Government of Japan. (2014). *Japan's Proactive Contribution to Peace*. Japan Gov.
- The Government of Japan. (2017). *Japan's Diplomatic Bluebook 2017*.
- Tuoitrenews. (2014). *Vietnam-Japan ties lifted to extensive strategic partnership*. Tuoitrenews.
- U.S. Energy Information Administration. (2013). *Japan is the second largest net importer of fossil fuels in the world*. U.S. Energy Information Administration.
- U.S. Energy Information Administration. (2020). *International Analysis - Japan*.
- UNCTAD. (2018). *TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 2018*.
- UNCTAD. (2019). *MARITIME PROFILE: JAPAN*.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Mc-Graw Hill.